

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

a. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengemukakan pengertian dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Menurut Kementerian Keuangan (2015), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai guncangan krisis ekonomi. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan adanya sektor Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah ini, pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pun telah terbukti menjadi pilar perekonomian yang tangguh.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang dikelola atau dijalankan oleh individu, badan usaha, atau sekelompok masyarakat yang diklasifikasikan sesuai kriteria dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM dapat mendorong perekonomian Indonesia dengan menciptakan peluang kerja bagi tenaga kerja dalam negeri dan mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. UMKM di Indonesia memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian nasional.

b. Tujuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan suatu usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi, yang berkeadilan. Kemudian UMKM juga memiliki asas-asas sebagai berikut, yaitu kekeluargaan, kebersamaan, demokrasi ekonomi, efisien keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, kesatuan ekonomi nasional. Klasifikasi lainnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam websitenya, usaha mikro memiliki tenaga kerja berjumlah 1-4 orang pekerja dan usaha kecil memiliki tenaga kerja berjumlah 5-19 orang. (Badan Pusat Statistik, 2017)

c. Ciri-ciri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Menurut Ciptaningsih (2016), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki beberapa ciri-ciri yaitu:

- 1) Jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- 2) Tempat usaha tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat.
- 3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan perusahaan.
- 4) Sumber daya manusia (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.

- 5) Tingkat pendidikan relative lebih rendah.
- 6) Umumnya belum memiliki akses perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga non bank.

d.Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 6, kriteria dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang ada di Indonesia adalah:

1) Usaha Mikro

Suatu usaha masuk dalam kriteria usaha mikro apabila badan usaha tersebut memiliki omset atau kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- tidak termasuk bangunan dan tanah. Selain itu, hasil dari penjualan usaha mikro tersebut harus mencapai minimal Rp. 300.000.000,- dalam jangka satu tahun.

2) Usaha Kecil

Suatu usaha dikatakan usaha kecil apabila usaha tersebut memiliki kekayaan yang bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- dengan kebutuhan yang dipakai maksimal Rp. 500.000.000,-. Hasil penjualan yang didapat selama satu tahun mencapai minimal Rp. 300.000.000,- dan maksimal Rp. 2.500.000.000,-.

3) Usaha Menengah

Kekayaan dari usaha menengah yaitu paling banyak Rp. 500.000.000,- sampai Rp. 10.000.000.000,- untuk saat ini

dan tidak termasuk tanah serta bangunan. Dengan hasil penjualan tahunan harus mencapai Rp. 2.500.000.000,- sampai Rp. 50.000.000.000,-.

2 Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

a. Pengertian Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa, pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pengetahuan akan pentingnya laporan keuangan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah saat ini masih minim, mengingat pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini banyak yang belum sadar dan belum bisa merasakan manfaat yang akan mereka peroleh. Kebanyakan merasa takut jika keuangannya diketahui oleh pemerintah sehingga akan dikenakan pajak. Padahal, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini bisa mengajukan keberatan atas pembayaran pajak jika belum mampu secara ekonomis (Silvia dan Azmi, 2019).

Mengacu pada penelitian Paxia (2018), indikator persepsi pengusaha pada penelitian ini adalah:

1. Menyusun Laporan Keuangan itu mudah

2. Informasi dalam Laporan Keuangan digunakan untuk pengambilan keputusan
3. Menyusun Laporan Keuangan sesuai standar yang berlaku
4. Dalam sebuah usaha penting untuk menyusun Laporan Keuangan

3. Tingkat Pendidikan

a. Pengertian Tingkat Pendidikan

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Berdasarkan wawancara dengan Staf Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Bantul, masih terdapat UMKM yang tidak menyusun laporan keuangan karena mereka memiliki tingkat pendidikan yang tidak sama bahkan ada yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD). Hal tersebut yang membuat UMKM tidak mampu menyusun laporan keuangan (Zantika, 2019). Mengacu pada penelitian dari Silvia dan Azmi

(2019) dan penelitian dari Wahyu dan Maswar (2017), beberapa indikator dari tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Menempuh Jenjang Pendidikan Formal
 - a) Jenjang Pendidikan Dasar
 - b) Jenjang Pendidikan Menengah
 - c) Jenjang Pendidikan Tinggi
- 2) Kesesuaian Jurusan
- 3) Mengikuti Pelatihan atau Kursus
- 4) Mempelajari Ilmu Secara Otodidak atau Mandiri

4. Umur Usaha

a. Pengertian Umur Usaha

Umur usaha atau lama usaha adalah lamanya seorang pengusaha atau pedagang menjalankan usahanya. Lama pembukaan usaha dapat mempengaruhi produktivitas atau keahliannya, sehingga dapat menambah efisiensi dan mampu menekan biaya produksi lebih kecil daripada hasil penjualan. Selain itu, keterampilan berdagang makin bertambah dan semakin banyak pula reaksi bisnis maupun pelanggan yang berhasil dijaring (Nainggolan, 2016).

Lamanya suatu usaha melakukan kegiatan usahanya merupakan umur usaha. Kegiatan yang dilakukan adalah menjalankan operasional usaha dalam hitungan tahun. Semakin meningkat aktivitas maka perlu dukungan dengan adanya informasi laporan keuangan yang akurat, sehingga mampu memberikan arahan dalam pengambilan keputusan perusahaan (Ari dan Ismuwan, 2018)

Indikator umur usaha yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Rudiantoro dan Siregar (2012) adalah umur usaha diukur berdasarkan waktu dalam hitungan tahun semenjak berdirinya usaha hingga penelitian ini dilakukan. Untuk mengukur umur usaha adalah menggunakan angka absolute dari umur usaha yang dihitung dari usaha itu berdiri hingga penelitian ini dilakukan.

5.Laporan Keuangan

a.Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan yang mempunyai fungsi, baik untuk kepentingan internal maupun eksternal bagi perusahaan. Laporan keuangan yang berkualitas dan dapat diandalkan tentu harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini, laporan keuangan harus disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Silvia dan Azmi, 2019).

Menurut Zantika (2019), Penyusunan laporan keuangan oleh pelaku UMKM juga dapat bermanfaat oleh pemerintah untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM yang belum berkembang, serta memudahkan pelaksanaan program-program pemberdayaan UMKM lainnya. Laporan keuangan menjadi penting pada sebuah entitas bisnis karena laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu dalam jangka waktu tertentu. Laporan keuangan juga merupakan komponen mutlak yang harus dimiliki UMKM jika mereka ingin

mengembangkan usahanya dengan mengajukan modal kepada kreditor yang dalam hal ini adalah pihak perbankan karena itu kegiatan mencatat dalam setiap kegiatan usaha UMKM harus tercermin dalam penyusunan laporan keuangan (Ciptaningsih, 2016).

b. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut SAK EMKM adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas, seperti kreditor maupun investor. Dalam memenuhi tujuannya laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016:3).

6. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah

a. Pengertian SAK EMKM

SAK EMKM adalah Standar Akuntansi Keuangan yang dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah. Entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama 2 tahun berturut-turut. SAK EMKM dapat digunakan oleh entitas yang tidak memenuhi definisi dan kriteria yang sudah disebutkan sebelumnya, jika otoritas mengizinkan entitas tersebut menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM (Ikatan Akuntan Indonesia 2016:1).

Terkait dengan keterbatasan UMKM dalam membuat laporan keuangan, maka untuk memudahkan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mengesahkan SAK EMKM. Dengan adanya SAK EMKM maka sangat diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan dan pengembangan pedoman atau panduan akuntansi bagi UMKM yang bergerak di berbagai bidang usaha (Zantika, 2019).

Berdasarkan SAK EMKM (2016) indikator laporan keuangan minimum untuk UMKM yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Laba Rugi
3. Catatan Atas Laporan Keuangan

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

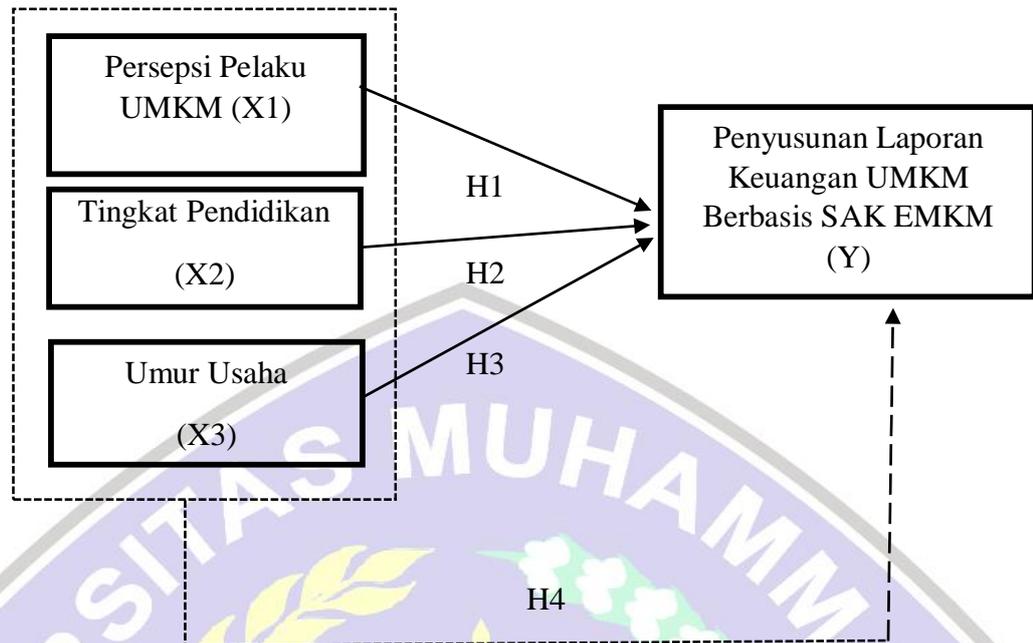
No.	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ciptaningsih, R.A (2016)	Pengaruh Tingkat pendidikan, Kontrol Perilaku, Dan Pengalaman usaha Terhadap Minat Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada UMKM Di Wilayah Kecamatan Maos Cilacap)	Kuantitatif dengan metode analisis data regresi berganda, uji validitas data, dan uji hipotesis.	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Tingkat Pendidikan, Kontrol Perilaku, dan Pengalaman Usaha tidak berpengaruh terhadap minat penyusunan laporan keuangan. Sedangkan Sikap dan secara keseluruhan berpengaruh terhadap minat penyusunan laporan keuangan bagi pelaku UMKM di Kecamatan Maos.
2.	Nurhidayanti F (2019)	Pengaruh Pemahaman Teknologi Informasi, Latar Belakang Pendidikan Pemilik, Umur Usaha, dan Persepsi Kemudahan UMUM Terhadap Implementasi SAK-EMKM Pada UMKM Di Kecamatan Kramat Kab Tegal	Deskriptif Kuantitatif dengan menggunakan metode survey media kuisisioner (angket), analisis asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable Pemahaman Teknologi Informasi dan Umur Usaha tidak berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM, sedangkan variable lain seperti Latar Belakang Pendidikan dan Persepsi Kemudahan UMKM berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kecamatan Kramat Kab Tegal.
3.	Silvia, dan Azmi, F (2019)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Usaha UMKM Terhadap Laporan	Deskriptif Kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda.	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Tingkat Pendidikan, Pemanfaat Teknologi Informasi, dan Lama Usaha tidak berpengaruh terhadap

		Keuangan Berbasis SAK EMKM		persepsi pengusaha UMKM terkait pentingnya laporan keuangan berbasis SAK EMKM, sedangkan Omset dan Pemberian Informasi dan Sosialisasi SAK EMKM memiliki pengaruh terhadap persepsi pengusaha UMKM terkait pentingnya laporan keuangan berbasis SAK EMKM.
4.	Zantika, A (2019)	Pengaruh Persepsi Atas Tujuan Laporan Keuangan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Praktik Penyusunan Laporan Keuangan	Kuantitatif dengan menggunakan kuesioner dan analisis regresi berganda.	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh pada Persepsi atas Tujuan Laporan Keuangan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Praktik Penyusunan Laporan Keuangan.
5.	Hasani, R dan Nuzul Ainy, R (2019)	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi UMKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)	Kuantitatif dengan menggunakan data primer dan metode deskriptif data dan analisis data.	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Pemberian Informasi dan Sosialisasi, Jenjang Pendidikan, dan Lama Usaha berpengaruh terhadap UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan EMKM, sedangkan Latar Belakang Pendidikan dan Ukuran Usaha tidak berpengaruh.

Sumber: Data diolah (2020).

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan beberapa teori yang telah dijelaskan mengenai variabel yang dapat mempengaruhi penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Keterangan gambar:

- = Pengaruh variabel independen (X1, X2, X3) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial.
- - - → = Pengaruh variabel independen (X1, X2, X3) terhadap variabel dependen (Y) secara bersama-sama.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Dari kerangka konseptual diatas menunjukkan bahwa persepsi pelaku UMKM, tingkat pendidikan, dan umur usaha dapat mempengaruhi atau tidak mempengaruhi pelaku UMKM untuk penyusunan laporan keuangan yang berbasis SAK EMKM. Penelitian ini memiliki 3 variabel independen (bebas) yaitu persepsi pelaku UMKM (X1), tingkat pendidikan (X2), dan umur usaha (X3). Sedangkan untuk variabel dependen atau variabel yang terpengaruhi dalam penelitian ini adalah penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM (Y).

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara (pendugaan) terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban yang empiric (Sugiyono, 2012:93).

1. Pengaruh Persepsi Pelaku UMKM terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM pada UMKM Industri Se-Keabupaten Ponorogo

Persepsi pelaku UMKM yaitu tindakan seseorang melalui panca indera penglihatan dan pendengaran tentang perkembangan usaha maupun pengelolaan usaha (Tarmizi dan Bugawanti, 2013). Hasil penelitian dari Fany Nurhidayanti (2019) menyatakan bahwa persepsi pelaku UMKM berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian dari Annies Zantika (2019) yang menyatakan bahwa persepsi pelaku UMKM berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM. Sedangkan menurut penelitian dari Viola Syukrina (2018) menyatakan bahwa persepsi pelaku UMKM tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

Ho1: Persepsi Pelaku UMKM tidak berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM pada UMKM Industri Se-Kabupaten Ponorogo

Ha1: Persepsi Pelaku UMKM berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM pada UMKM Industri Se-Kabupaten Ponorogo

2. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM pada UMKM Industri Se-Kabupaten Ponorogo

Undang-undang Sisdiknas tahun 2003 memaparkan bahwa pendidikan nasional memiliki fungsi sebagai pembentuk kemampuan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangkamencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berilmu, kreatif, mandiri serta menjadi warga Negara yang demokratis serta tanggung jawab (Pasal 3 UU RI No. 20 tahun 2003).

Penelitian yang dilakukan oleh Roal Hasani dan Rintan Nuzul Ainy (2019) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian dari Fany Nurhidayanti (2019) yang juga menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM.

Sedangkan menurut hasil penelitian dari Bella Silvia dan Fika Azmi (2019) menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM.

Dari hasil uraian diatas, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

Ho2: Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM pada UMKM Industri Se- Kabupaten Ponorogo

Ha2: Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM pada UMKM Industri Se-Kabupaten Ponorogo

3. Pengaruh Umur Usaha terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM pada UMKM Industri Se-Kabupaten Ponorogo

Umur usaha atau lamanya usaha dalam hal ini yaitu lamanya suatu UMKM berdiri sejak usaha tersebut berdiri hingga pada saat penulis melakukan penelitian (Murniati, 2002). Lamanya usaha juga menentukan pola pikir pemilik untuk mengambil sebuah keputusan, jika pemilik UMKM ingin eksistensi usahanya tetap ada di kalangan masyarakat maka harus membuat sebuah keputusan yang dapat memperpanjang lama usahanya. Semakin tinggi lama usaha yang dijalankan maka semakin baik pula perkembangan usahanya (Soraya dan Mahmud, 2016).

Hasil penelitian dari Roal Hasani dan Rintan Nuzul Ainy (2019) menyatakan bahwa umur usaha berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM. Sedangkan, menurut hasil penelitian dari Fany Nurhidayanti (2019) menyatakan bahwa umur usaha tidak berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian dari Bella Silvia dan Fika Azmi (2019) menyatakan bahwa umur usaha tidak berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

Ho3: Umur usaha tidak berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM pada UMKM Industri Se-Kabupaten Ponorogo

Ha3: Umur usaha berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM pada UMKM Industri Se-Kabupaten Ponorogo

4. Pengaruh Persepsi Pelaku UMKM, Tingkat Pendidikan, dan Umur Usaha terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM pada UMKM Industri Se- Kabupaten Ponorogo

Selain persepsi pelaku UMKM dan tingkat pendidikan yang mempengaruhi penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM, umur usaha juga dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan pentingnya penggunaan laporan

keuangan tersebut untuk proses perkembangan usaha yang dijalani. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurhidayanti (2019) yang menyatakan bahwa persepsi pelaku UMKM, tingkat pendidikan, dan umur usaha berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar SAK EMKM.

Ho4: Persepsi pelaku UMKM, tingkat pendidikan dan umur usaha tidak berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM pada UMKM Industri Se- Kabupaten Ponorogo

Ha4: Persepsi pelaku UMKM, tingkat pendidikan dan umur usaha berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM pada UMKM Industri Se- Kabupaten Ponorogo

